

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*) sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu, pencapaian pertanian berkelanjutan sudah menjadi komitmen negara dalam rangka menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Fathnur dkk., 2023).

Pertanian juga memiliki peranan sangat penting terhadap penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Mengoptimalkan sektor pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Produksi pangan yang memadai tidak hanya dapat menekan potensi krisis pangan, tetapi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Salsabila & Wulandari 2025).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar yang harus diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan meliputi ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan pangan (*affordability*) dan akses terhadap pangan (*accessability*).

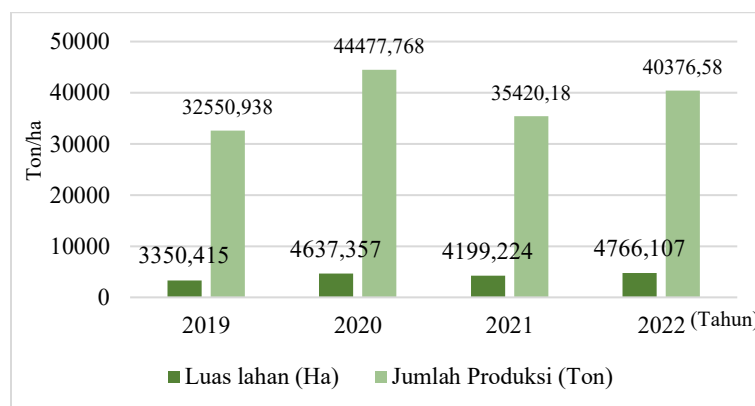
Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang pertanian saat ini telah dikembangkan berbagai sistem pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sistem pertanian tersebut merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama dalam bidang pertanian (Indahyani dkk., 2022). Konsep ini mulai muncul secara signifikan pada paruh kedua abad ke-20 sebagai respons terhadap kekhawatiran yang timbul akibat adanya revolusi hijau (Prihartini dkk., 2024).

Pertanian yang tidak berkelanjutan seringkali mengakibatkan penurunan produksi dan produktivitas secara terus menerus karena pengelolaan agroekosistem

yang bersifat degeneratif akibat terjadinya degradasi lahan, penurunan keragaman hayati dan aktivitas organisme tanah karena kurangnya kandungan bahan organik dan ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah, dan terjadinya erosi karena praktik budidaya yang kurang tepat (Evizal, 2022).

Pertanian organik merupakan salah satu bagian dari pertanian berkelanjutan yang memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dengan menekankan penggunaan input alami seperti mineral dan produk yang berasal dari tumbuhan serta penolakan terhadap pupuk dan pestisida sintetis. Oleh karena itu, pertanian organik dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah (FAO, 2020).

Pertanian organik di Indonesia mulai diperkenalkan dengan dikembangkannya usahatani sayuran organik di Bogor pada Tahun 1984. Perkembangannya didukung oleh adanya gaya hidup sehat atau kembali ke alam (*Back to nature*) yang telah menjadi *trend* baru di masyarakat (Manuhutu & Wahyu, 2005). Paradigma baru untuk mendapatkan produk makanan yang diinginkan sesuai dengan standar kesehatan dan gaya hidup terdapat pada padi organik (Heryadi, 2021). Berdasarkan survei konsumen pada tahun 2022 diketahui bahwa padi organik menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dicari oleh konsumen dan menjadi produk permintaan tiga teratas dari produk organik lainnya (SPOI, 2023). Data perkembangan luas lahan padi organik dan produksi beras organik di Indonesia dari Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : SPOI, 2023

Gambar 1. Perkembangan Luas Lahan Padi Organik dan Produksi Beras Organik di Indonesia Tahun 2019-2022

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa luas lahan padi organik di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 mengalami peningkatan luas lahan sebesar 38,41 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,45 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 13,5 persen. Terjadinya fluktuasi penggunaan luas lahan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga sebagian lahan menjadi tidak produktif (Kementan, 2023).

Produksi beras organik dari tahun 2019 hingga tahun 2022 juga mengalami fluktuasi. Tahun 2020 produksi beras mengalami peningkatan sebesar 36,64 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,36 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 13,99 persen. Terjadinya fluktuasi hasil produksi sejalan dengan fluktuasinya luas lahan beras organik. Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penghasil produksi beras organik terbesar ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, untuk produsen beras organik terbanyak Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke 2 yaitu sebanyak 1001 produsen (SPOI, 2023).

Pemerintah Jawa Barat mendukung pertanian organik melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura untuk mendorong dan mengatur pertanian organik di wilayah Jawa Barat. Salah satu tujuan disahkannya perda ini yaitu sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan produksi pertanian yang diwujudkan melalui penerapan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Salah satu sentra produksi beras organik di daerah Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah di Selatan Jawa Barat yang sudah mengimplementasikan pertanian organik sejak tahun 2003 yaitu seluas 45 ha dan mencapai puncaknya pada tahun 2011 seluas 10.551 hektar (Aminah dkk., 2018). Pelopor pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Gapoktan Simpatik yang terdiri dari 25 kelompok tani yang tersebar di 8 Kecamatan. Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan salah satu daerah yang sudah pernah mendapatkan sertifikasi internasional dari lembaga *Institute for Marketecology*

(IMO) pada tahun 2009 (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cisayong, 2025). Adapun salah satu daerah yang sudah menerapkan pertanian organik adalah Kecamatan Cisayong.

Pertanian organik di Kecamatan Cisayong mulai dikenalkan sejak tahun 2006. Sejak saat itu terdapat beberapa kelompok tani yang mulai beralih dari usahatani padi konvensional menjadi usahatani padi organik. Kecamatan Cisayong juga pernah dijadikan sebagai contoh bagi kecamatan yang lainnya dalam melaksanakan usahatani padi organik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu petani yang mengusahakan usahatani padi organik tersebut menjadi menurun, bahkan hanya tiga kelompok tani saja yang sudah pernah memperoleh sertifikasi organik. Kelompok Tani tersebut diantaranya Kelompok Tani Cidahu, Kelompok Tani Mekarjayahurip, dan Kelompok Tani Wangunsari (Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Cisayong).

Menurunnya luas lahan dan jumlah petani padi organik disebabkan karena budidaya padi organik dianggap lebih rumit dalam pemeliharannya. Selain itu, lahan yang sempit juga menjadi permasalahan karena berdampak pada rendahnya skala ekonomi dan efisiensi produksi sehingga menyulitkan petani untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kurnia dkk., 2022; Nugraha dkk., 2024).

Hasil survei pendahuluan juga menunjukkan bahwa hingga saat ini usahatani padi organik di Kecamatan Cisayong masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi terhadap keberlanjutan usahatannya mulai dari dimensi ekologi hingga dimensi kelembagaan. Dimensi ekologi permasalahan yang terjadi adalah rendahnya produksi yang dihasilkan karena kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Perubahan iklim menurut Widiawati dkk., (2025) memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi padi, baik secara langsung melalui peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun secara tidak langsung melalui gangguan fisiologis. Pada tahun 2020 hingga 2024 rata-rata petani hanya mampu menerapkan Indeks Pertanaman (IP) dua kali dalam setahun. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan air yang seringkali mengalami kekeringan pada musim kemarau. Rendahnya pasokan air juga disebabkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian (pemukiman). Selain itu,

petani juga menghadapi tantangan dalam ketersediaan pupuk organik. Salah satunya disebabkan karena belum terintegrasinya tanaman dan ternak yang optimal.

Dimensi ekonomi permasalahan yang terjadi adalah tingginya biaya sertifikasi dan terbatasnya akses petani terhadap pasar yang lebih luas. Konsumen beras organik di daerah setempat masih relatif terbatas dan umumnya berasal dari masyarakat golongan menengah ke atas serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pola hidup sehat. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan persediaan sehingga petani tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kaleka dkk., (2025) menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan strategi pemasaran bagi petani tidak dapat diabaikan. Tanpa adanya inovasi dalam pemasaran, petani akan terus mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Kemudian, keterbatasan ketersediaan pupuk organik pada tingkat petani juga menyebabkan kebutuhan pupuk belum sepenuhnya terpenuhi sehingga harus melakukan pembelian pupuk dari luar yang berdampak pada penambahan biaya produksi usahatani.

Dimensi sosial budaya permasalahan yang terjadi adalah rendahnya minat generasi muda yang bekerja di sektor pertanian terutama pada usahatani padi organik menyebabkan regenerasi petani menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya pasokan air juga menjadi salah satu faktor penghambat karena menyebabkan ketidakadilan yang dapat mengganggu stabilitas dan kohesi sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dkk., (2021) kegiatan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan dampaknya akan menimbulkan konflik sosial antara petani dengan warga karena terputusnya aliran irigasi akibat pembangunan pemukiman.

Dimensi teknologi/infrastruktur permasalahan yang terjadi adalah jaringan irigasi yang masih terbatas dan saluran irigasi yang sepenuhnya belum berfungsi dengan optimal. Hal tersebut menyebabkan masih terdapat lahan yang belum memperoleh pasokan air yang memadai sehingga tanaman berpotensi mengalami kekurangan air. Padahal menurut Wenggol & Tiwu (2024) infrastruktur pendukung pertanian berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pangan. Selain itu, petani juga belum dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pelaksanaan

budidaya hingga pemasaran hasil panennya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gawe dkk., (2025) menjelaskan bahwa kendala utama dalam menggunakan teknologi ialah biaya peralatan yang cukup mahal, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan teknologi, dan kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang menyebabkan petani kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dimensi kelembagaan permasalahan yang terjadi adalah rendahnya fungsi lembaga penunjang, yaitu lembaga pemasaran yang dapat menyebabkan petani kekurangan akses terhadap informasi pasar yang akurat dan terkini. Hal tersebut terjadi karena petani belum dapat membentuk kemitraan yang berkelanjutan dalam memasarkan hasil panennya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hammada (2024) terdapat empat permasalahan yang serius dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia diantaranya adalah rendahnya kompetensi petani, tidak optimalnya peran kelembagaan petani dan kurang efektifnya dukungan pemerintah.

Permasalahan yang terdapat pada setiap dimensi keberlanjutan dapat menjadi penghambat dalam menjalankan kegiatan usahatani padi organik yang pada akhirnya akan menentukan terhadap keberlanjutan usahatani tersebut. Keberlanjutan pertanian organik melibatkan tiga dimensi utama meliputi ekologi, ekonomi, dan sosial. Dimensi ekologi berkaitan dengan mempertahankan atau meningkatkan kesehatan ekosistem alam. Dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Dimensi sosial berkaitan dengan kemampuan dalam memperoleh manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan komunitas petani (Zendrato dkk., 2024). Selain itu, dimensi teknologi/infrastruktur berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi pada infrastruktur yang lebih baik. Dimensi hukum/kelembagaan berkaitan dengan pematuhan hukum dan pelaksanaan fungsi kelembagaan (Suyitman dkk., 2009).

Penelitian sebelumnya telah banyak menjelaskan tentang faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi produksi pada usahatani padi organik (Machmudin dkk., 2019). Hambatan partisipasi petani dalam pengembangan padi organik (Aminah dkk., 2018). Secara umum, penelitian sebelumnya berfokus pada faktor sosial dan ekonomi petani dalam melakukan usahatani padi organik dan belum

membahas dimensi-dimensi lain seperti ekologi, teknologi beserta kelembagaannya. Penelitian yang komprehensif (multidimensi) sangat penting dilakukan untuk menjaga eksistensi pertanian organik di Kecamatan Cisayong.

Penelitian ini menganalisis tingkat dan status keberlanjutan usahatani padi organik serta atribut-atribut yang dapat mempengaruhinya dengan menggunakan lima dimensi keberlanjutan meliputi dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi/infrastruktur dan kelembagaan. Penelitian mengenai tingkat dan status keberlanjutan usahatani padi organik penting dilakukan guna mengetahui dan memberikan strategi yang tepat dalam mendukung pengambilan keputusan untuk menentukan keberlanjutan di masa yang akan datang (Fauzi dkk., 2019). Agar dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan usahatani padi organik di Kecamatan Cisayong.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana tingkat dan status keberlanjutan usahatani padi organik. Dengan demikian, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah "Keberlanjutan Usahatani Padi Organik di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya."

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat keberlanjutan usahatani padi organik di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana status keberlanjutan dari setiap dimensi (ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi/infrastruktur, dan kelembagaan) usahatani padi organik di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tingkat keberlanjutan usahatani padi organik di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menganalisis status keberlanjutan dari setiap dimensi (ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi/infrastruktur, dan kelembagaan) pada usahatani padi organik di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai keberlanjutan usahatani padi organik dan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di perkuliahan.
2. Bagi petani, penelitian ini memberikan informasi mengenai status keberlanjutan dan atribut-atribut yang mempengaruhi usahatani padi organik yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usahatannya.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi pemerintah atau pemangku kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk memperbaiki dan mengembangkan usahatani padi organik.